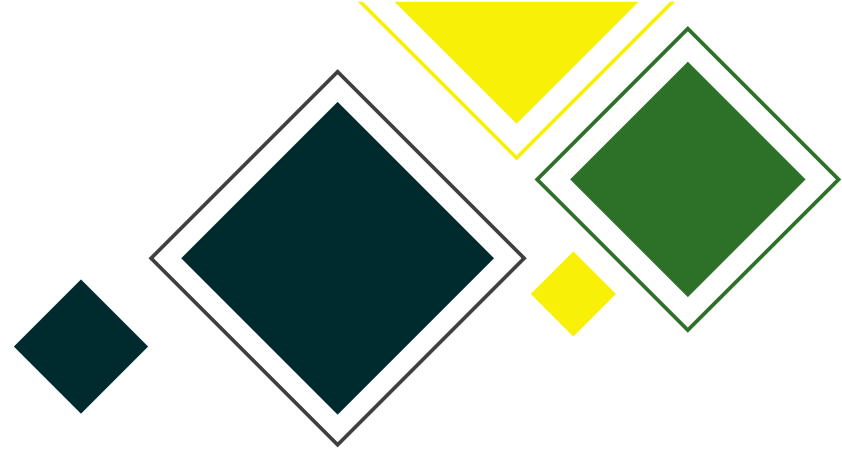




Warta Pengawasan Natuna

Pencegahan Korupsi: Dari Dokumen ke Pengendalian

Edisi Semester I 2026

Rafli KFY - Yohanes PLS - Ely Nene ACS - Desi Anthonys





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026



KPK Hadir di Natuna Rangkaian koordinasi 8-9 April 2026

Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Natuna pada 8-9 April 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Melalui sinergi dan kolaborasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Natuna.

Kronologi Kegiatan

- 2 April 2026**
Surat undangan KPK
KPK mengirimkan surat undangan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk koordinasi pencegahan korupsi.
- 6 April 2026**
Undangan Pemkab Natuna
Pemerintah Kabupaten Natuna menindaklanjuti dengan mengundang Forkopimda, kepala OPD, dan camat.
- 8 April 2026**
Rakor pencegahan korupsi
Dilaksanakan rapat koordinasi dengan KPK, Pemerintah Daerah, Forkopimda, kepala OPD, dan camat.
- 9 April 2026**
Tinjau proyek PBJ strategis
KPK melakukan peninjauan lapangan ke proyek pengadaan barang dan jasa strategis di Kabupaten Natuna.

Tujuan Utama Kunjungan

- Memperkuat Tata Kelola di Gerbang Utara NKRI**
Mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas sebagai bagian dari penguatan daerah perbatasan.
- Mendorong Sistem Pemerintahan yang Lebih Transparan dan Akuntabel**
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Mengawal Program Strategis agar Tepat Sasaran**
Memberikan pendampingan dan masukan untuk memastikan program dan proyek strategis daerah, termasuk pengadaan barang dan jasa, berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.



Suasana rapat koordinasi KPK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Forkopimda, kepala OPD, dan camat.



Penyampaian materi dan arahan dari KPK dalam rangka penguatan strategi pencegahan korupsi.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

*Natuna
Maju
Berintegritas*

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026

Dasar Hukum Pencegahan Korupsi

Landasan kebijakan bagi tata kelola yang bersih dan akuntabel

01



UU Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menetapkan asas, prinsip, dan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, serta akuntabel guna mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

02



UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengatur jenis tindak pidana korupsi, sanksi pidana, serta memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

03



UU Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menetapkan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam koordinasi, supervisi, pencegahan, serta penindakan tindak pidana korupsi secara independen, profesional, dan berintegritas.

04



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Menetapkan arah, fokus, dan rencana aksi nasional pencegahan korupsi yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan kolaboratif dan terukur.

05



Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2025

tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2025–2029.

Menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, serta program KPK untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dan berdampak.

“Pencegahan korupsi dimulai dari penguatan sistem dan integritas aparatur.”





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026



MCP sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola

Monitoring Center for Prevention di Kabupaten Natuna

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah instrumen koordinasi dan supervisi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan sistem tata kelola, mengidentifikasi area-area yang berisiko, serta memperkuat pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.



8 Area Intervensi MCP

1



Perencanaan dan Penganggaran

Memastikan perencanaan dan penganggaran daerah lebih berkualitas, tepat sasaran, dan transparan.

2



Pengadaan Barang/Jasa

Mendorong pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.

3



Pengelolaan BMD/Aset

Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar lebih tertib, transparan, dan memberikan nilai manfaat bagi daerah.

4



Optimalisasi Pendapatan Daerah

Meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel.

5



Manajemen ASN

Mendorong pengelolaan ASN yang profesional, transparan, dan berbasis merit.

6



Penguatan APIP

Memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan yang independen dan efektif.

7



Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.

8



Tata Kelola Pemerintahan Desa

Memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.



MCP tidak hanya menilai dokumen,
tetapi mendorong perubahan nyata dalam sistem pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

*Natuna
Maju
Berintegritas*

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026

8 Area Intervensi MCP

Bagian I

Empat area intervensi pertama merupakan prioritas utama dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna.

1



Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Memastikan perencanaan dan penganggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

- ✓ Penyusunan perencanaan sesuai regulasi dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- ✓ Penganggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran.
- ✓ Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

2



Pengadaan Barang dan Jasa

Memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan di seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.

- ✓ Pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
- ✓ Transparansi informasi dan dokumentasi pada setiap tahapan.
- ✓ Penguatan pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan.

3



Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatkan tertib administrasi, pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah.

- ✓ Penatausahaan dan pencatatan aset yang akurat dan mutakhir.
- ✓ Pemanfaatan aset secara optimal sesuai ketentuan.
- ✓ Pengamanan aset untuk mencegah kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan.

4



Optimalisasi Pendapatan Daerah

Meningkatkan pengelolaan pajak, retribusi, dan potensi pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.

- ✓ Optimalisasi potensi pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan.
- ✓ Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah.
- ✓ Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026

8 Area Intervensi MCP

Bagian II

Keempat area intervensi ini memperkuat integritas, pengawasan, kualitas pelayanan, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan dan tata kelola desa.

5

Manajemen ASN

Mewujudkan ASN yang profesional, objektif, transparan, dan berintegritas.



Penempatan dan pengembangan ASN berbasis kompetensi.



Proses yang objektif, transparan, dan akuntabel.



Penguatan integritas dan kode etik ASN.

6

Penguatan APIP

Memastikan pengawasan internal efektif dalam mencegah penyimpangan.



Pengawasan berbasis risiko dan data.



Rekomendasi perbaikan yang tepat dan terukur.



Peningkatan kapasitas dan independensi APIP.

7

Pelayanan Publik

Pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas dari praktik tidak semestinya.



Prosedur layanan sederhana dan mudah diakses.



Layanan cepat, transparan, dan pasti.



Bebas dari pungutan liar dan praktik tidak semestinya.

8

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Memperluas budaya antikorupsi hingga di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.



Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.



Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan.



Penerapan tata kelola desa yang berintegritas dan partisipatif.



Keberhasilan MCP diukur dari **perubahan nyata dalam tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan.**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026



Memperkuat Pencegahan, Bukan Sekadar Penindakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna

Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum, tetapi harus dibangun melalui sistem pencegahan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

Melalui koordinasi dan pendampingan peningkatan penerapan strategi pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong penguatan pengawasan internal, transparansi keuangan daerah, kepatuhan perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai langkah nyata mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem dan integritas aparatur.”



Empat Penguatan Utama



Sistem
Pengawasan



Transparansi
Keuangan



Kepatuhan
Perangkat Daerah



Pelayanan
Publik



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

*Natuna
Maju
Berintegritas*

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026



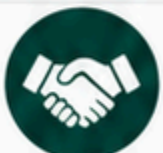
Sinergi dan Kolaborasi Menjadi Kunci

Menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas

Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, sektor usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Natuna.



Komitmen Bersama



Memperkuat
Koordinasi
dengan KPK



Mendorong
Budaya
Integritas



Keterbukaan
Informasi Publik



Partisipasi
Masyarakat

“Tujuan akhir dari seluruh upaya pencegahan korupsi adalah pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.”



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026



Dari Rapat ke Lapangan Peninjauan proyek strategis PBJ di Kabupaten Natuna

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK, Pemerintah Kabupaten Natuna, Forkopimda, para kepala OPD dan camat, agenda dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan terhadap proyek-proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan prosedur, kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaatnya bagi masyarakat.



Fokus Peninjauan



Kepatuhan
Prosedur



Kualitas
Pekerjaan



Ketepatan
Sasaran



Manfaat bagi
Masyarakat

Objek Strategis yang Ditinjau



Pembangunan
Rumah dan
Drainase



Pembangunan
Jalan



Peningkatan
Fasilitas Layanan
Kesehatan



Proyek Strategis
Lainnya di Natuna





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai, Kepulauan Riau • inspektorat@natunakab.go.id

Natuna
Maju
Berintegritas

BULETIN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Semester I • 2026

Bersama Membangun Natuna yang Berintegritas

Penutup

Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan sistem yang semakin kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Natuna dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.



Ayo Bersama Ambil Peran!



Gunakan Kanal Pengaduan dan Konsultasi

Sampaikan informasi, aduan, atau konsultasi terkait pelayanan publik dan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi.



Dukung Pelayanan yang Transparan

Manfaatkan layanan publik sesuai prosedur dan dorong keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.



Ikut Mengawasi Pembangunan

Berperan aktif memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna demi hasil yang tepat sasaran dan berkualitas.



Bangun Budaya Integritas dari Lingkungan Terdekat

Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan menjunjung kejujuran, disiplin, dan tolak segala bentuk praktik korupsi.



Dengan sistem yang semakin kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, kita optimis kualitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna akan terus meningkat, sejalan dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.



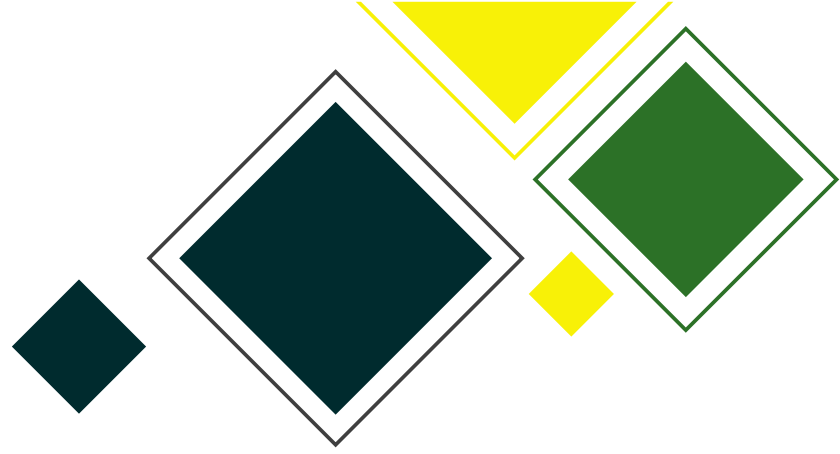
Website Resmi:
inspektorat.natunakab.go.id



Email:
inspektorat@natunakab.go.id



Instagram Resmi:
[@inspektorat.natunakab](https://www.instagram.com/inspektorat.natunakab)



KONTAK

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA



Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai



Email: inspektorat@natunakab.co.id



Website: inspektorat@natunakab.co.id



Pindai untuk akses kanal resmi Inspektorat Natuna

